

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Taman Hutan Raya (Tahura) merupakan salah satu bentuk kawasan konservasi yang memiliki karakteristik unik dalam sistem pengelolaan sumber daya alam di Indonesia (Hamid, Prayitno, et al., 2025). Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Tahura didefinisikan sebagai kawasan pelestarian alam untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang dimanfaatkan bagi berbagai kepentingan strategis. Fungsi-fungsi tersebut mencakup penelitian ilmiah untuk pengembangan pengetahuan biodiversitas, pendidikan konservasi bagi generasi muda, penunjang budidaya untuk pelestarian plasma nutfah, pelestarian nilai-nilai budaya lokal, pengembangan pariwisata alam, serta penyediaan ruang rekreasi bagi masyarakat. Dengan beragamnya fungsi ini, Tahura dirancang sebagai kawasan yang mengintegrasikan kepentingan konservasi dengan pemanfaatan berkelanjutan.

Namun demikian, implementasi konsep ideal Tahura menghadapi tantangan kompleks di lapangan. Dari 17 Tahura yang tersebar di Indonesia dengan total luas 343.454,41 hektar, hampir seluruhnya menghadapi permasalahan tenurial dan sosial yang rumit (Hamid, Prayitno, et al., 2025). Permasalahan utama terletak pada keberadaan masyarakat yang telah mendiami dan memanfaatkan kawasan jauh sebelum penetapan status Tahura. Kondisi ini menciptakan dilema antara penegakan fungsi konservasi dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat yang telah berakar kuat. Konflik kepentingan ini semakin diperumit dengan lemahnya data historis penguasaan lahan, tumpang tindih klaim kepemilikan, serta keterbatasan kapasitas pengelola dalam menangani aspek sosial. Akibatnya, banyak Tahura yang mengalami degradasi fungsi ekologis akibat aktivitas masyarakat yang tidak terkendali, sementara di sisi lain upaya relokasi atau

pembatasan akses seringkali memicu resistensi dan konflik sosial yang berkepanjangan.

Tahura Raden Soerjo di Jawa Timur merepresentasikan kompleksitas pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia secara komprehensif (Hamid & Ningrum, 2025). Dengan luas mencapai 27.868,30 hektar, Tahura ini membentang melintasi wilayah administratif Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Batu. Posisi lintas kabupaten ini menciptakan tantangan koordinasi antar-pemerintah daerah dalam harmonisasi kebijakan, sinkronisasi program, dan pembagian tanggung jawab pengelolaan. Setiap daerah memiliki prioritas pembangunan, kapasitas fiskal, dan pendekatan kebijakan yang berbeda, sehingga seringkali terjadi inkonsistensi dalam implementasi program konservasi. Kompleksitas ini semakin meningkat dengan adanya perbedaan karakteristik sosial-ekonomi masyarakat di setiap wilayah administratif.

Keberadaan desa-desa penyangga di sekeliling Tahura R. Soerjo menambah dimensi tantangan pengelolaan (Hamid & Amir, 2020; Hamid & Surya, 2025a). Tercatat puluhan desa yang berbatasan langsung dengan kawasan, di mana mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Ketergantungan ekonomi terhadap lahan pertanian telah mendorong ekspansi aktivitas budidaya hingga memasuki kawasan hutan. Praktik pertanian intensif dengan penggunaan pestisida dan pupuk kimia, pembukaan lahan dengan sistem tebang bakar, serta konversi hutan menjadi lahan pertanian telah menyebabkan degradasi lingkungan yang signifikan. Erosi tanah mencapai tingkat mengkhawatirkan terutama di lereng-lereng curam, sedimentasi sungai meningkat drastis, kesuburan tanah menurun, dan keanekaragaman hayati terancam.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi menandai pergeseran paradigma pengelolaan dari pendekatan sentralistik menuju partisipatif. Regulasi ini mengamanatkan pelibatan aktif masyarakat dalam seluruh siklus pengelolaan kawasan konservasi. Pada tahap perencanaan, masyarakat dilibatkan dalam penyusunan zonasi, identifikasi

potensi kawasan, dan perumusan program kerja melalui mekanisme konsultasi publik dan musyawarah desa. Dalam aspek perlindungan, masyarakat berperan sebagai mitra pengamanan melalui kelompok masyarakat peduli hutan, sistem patroli bersama, dan pelaporan aktivitas ilegal. Untuk pengawetan, masyarakat terlibat dalam kegiatan restorasi ekosistem, pembibitan tanaman endemik, dan pelestarian kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.

Aspek pemanfaatan kawasan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengakses sumber daya secara berkelanjutan melalui skema perhutanan sosial, ekowisata berbasis masyarakat, dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Sementara dalam pengawasan, masyarakat berpartisipasi melalui sistem monitoring partisipatif (Hamid, Prasetyo, et al., 2025), audit sosial, dan mekanisme pengaduan. Implementasi pemberdayaan ini bertujuan ganda: menjaga kelestarian kawasan melalui pengurangan tekanan eksploitatif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui diversifikasi mata pencaharian. Pendekatan ini mengakui bahwa keberlanjutan konservasi tidak dapat dicapai tanpa dukungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun demikian, implementasinya menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran untuk program pemberdayaan, kapasitas SDM pengelola yang belum memadai, resistensi dari sebagian masyarakat yang sudah terlanjur bergantung pada eksploitasi sumber daya, serta lemahnya koordinasi antar-instansi terkait.

Tahura R. Soerjo memiliki signifikansi strategis yang melampaui fungsi konservasi konvensional. Secara ekologis, kawasan ini berfungsi sebagai benteng terakhir keanekaragaman hayati di Jawa Timur dengan menyimpan berbagai spesies endemik dan langka (Hamid, 2025b). Ekosistem hutan pegunungan yang masih relatif utuh menjadi habitat penting bagi satwa kunci seperti macan tutul jawa, lutung jawa, dan berbagai jenis burung endemik. Kawasan ini juga berperan vital dalam regulasi tata air regional, menyediakan pasokan air bersih bagi jutaan penduduk di hilir, mencegah banjir dan longsor, serta menjaga stabilitas iklim mikro. Fungsi penyerapan karbon oleh vegetasi hutan berkontribusi signifikan terhadap mitigasi

perubahan iklim (Hamid, 2025c). Dari aspek sosial, Tahura menjadi ruang pelestarian kearifan lokal, identitas budaya masyarakat pegunungan, dan arena pendidikan lingkungan bagi generasi muda. Nilai ekonomi kawasan tercermin dari potensi ekowisata yang menarik ribuan pengunjung setiap tahun, penyediaan air untuk irigasi pertanian, sumber plasma nutfah untuk bioteknologi, dan berbagai produk hutan non-kayu yang dapat dimanfaatkan berkelanjutan (Hamid, 2025a).

Namun demikian, realisasi nilai-nilai strategis tersebut terkendala oleh berbagai tantangan multidimensi yang saling terkait. Degradasi hutan akibat pembalakan liar, perambahan, dan kebakaran telah mengurangi tutupan hutan secara signifikan. Data menunjukkan laju deforestasi yang mengkhawatirkan dengan hilangnya ratusan hektar hutan setiap tahun. Konflik pemanfaatan lahan antara fungsi konservasi dengan kebutuhan ruang hidup masyarakat terus meningkat seiring pertumbuhan populasi. Tekanan ekonomi mendorong masyarakat melakukan eksploitasi sumber daya secara tidak berkelanjutan, mulai dari penebangan kayu, perburuan satwa, hingga konversi hutan menjadi lahan pertanian. Rendahnya kesadaran publik tentang pentingnya konservasi tercermin dari masih maraknya aktivitas yang merusak lingkungan. Lemahnya penegakan hukum memberikan ruang bagi pelaku kejahatan lingkungan untuk beroperasi. Koordinasi antar-pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, LSM, akademisi, dan sektor swasta masih berjalan tersendat-sendat tanpa platform kolaborasi yang efektif.

Menghadapi kompleksitas permasalahan tersebut, pengelolaan Tahura R. Soerjo memerlukan transformasi fundamental dari pendekatan konvensional menuju model pengelolaan adaptif berbasis sosial-ekologi (Hamid & Surya, 2025b). Pendekatan regulatif-punitif yang selama ini dominan terbukti tidak efektif mengatasi akar permasalahan. Diperlukan strategi komprehensif yang mengintegrasikan dimensi ekologi, sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Partisipasi aktif masyarakat harus diposisikan sebagai pilar utama keberlanjutan melalui berbagai mekanisme. Program peningkatan kesadaran lingkungan perlu dirancang secara sistematis dengan

melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan influencer lokal. Pendidikan konservasi harus dimulai sejak usia dini melalui kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah sekitar kawasan. Pembentukan dan penguatan kelompok masyarakat peduli lingkungan dengan insentif yang memadai dapat menjadi ujung tombak pengamanan kawasan.

Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan melalui pembentukan brigade siaga api, sistem deteksi dini berbasis masyarakat, dan kampanye anti pembakaran lahan sangat krusial mengingat sebagian besar kebakaran dipicu aktivitas manusia. Kolaborasi multi-pihak perlu diwujudkan melalui platform kelembagaan yang inklusif seperti forum pengelolaan kolaboratif, di mana semua pemangku kepentingan memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai kapasitas dan kewenangannya. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan regulator, masyarakat sebagai pelaku utama konservasi, LSM sebagai pendamping dan advokat, akademisi menyediakan basis ilmiah, dan sektor swasta berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial dan investasi hijau. Model pembiayaan berkelanjutan melalui payment for ecosystem services, ekowisata, carbon trading, dan bioprospecting dapat menjadi alternatif pendanaan jangka panjang. Penguatan kapasitas kelembagaan pengelola Tahura melalui peningkatan SDM, modernisasi teknologi pengawasan, dan reformasi birokrasi menjadi prasyarat efektivitas pengelolaan. Dengan transformasi holistik ini, Tahura R. Soerjo dapat mewujudkan visinya sebagai kawasan konservasi yang lestari sekaligus mensejahterakan masyarakat, menjadi model pengelolaan kawasan konservasi yang dapat direplikasi di berbagai wilayah Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan utama yang dirumuskan adalah:

1. Bagaimana pengaruh kebijakan pengelolaan Tahura terhadap kesadaran publik, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi multi-pihak?
2. Sejauh mana kesadaran masyarakat berperan sebagai mediator dalam memperkuat partisipasi dan kolaborasi?

3. Faktor apa saja yang perlu dioptimalkan agar pengelolaan Tahura dapat berjalan efektif, adaptif, dan berkelanjutan?

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan pengelolaan Tahura R. Soerjo. Tujuannya adalah:

1. Menganalisis pengaruh kebijakan konservasi terhadap kesadaran, partisipasi, dan kolaborasi masyarakat.
2. Mengidentifikasi peran kesadaran publik sebagai mediator dalam mendukung keberhasilan konservasi.
3. Memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan strategi pengelolaan Tahura yang lebih inklusif dan adaptif.

1.4. Hasil yang Diharapkan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

1. Menjadi dasar ilmiah dalam merumuskan kebijakan konservasi yang lebih responsif.
2. Memberikan model pengelolaan Tahura berbasis partisipasi masyarakat dan kolaborasi multi-pihak.
3. Menyediakan data empiris mengenai pengaruh kebijakan terhadap perilaku masyarakat sekitar kawasan konservasi.

1.5. Sasaran

Sasaran penelitian ini adalah:

1. Pemerintah daerah dan pengelola Tahura R. Soerjo sebagai pembuat kebijakan.
2. Masyarakat sekitar kawasan sebagai subjek partisipasi konservasi.
3. Lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan sektor swasta sebagai mitra kolaborasi dalam mendukung keberlanjutan Tahura.

1.6. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup penelitian mencakup analisis kebijakan konservasi di Tahura R. Soerjo, khususnya pada aspek kesadaran publik, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi pemerintah–masyarakat. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan pengolahan data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Selain itu, penelitian ini juga membahas tantangan praktis pengelolaan Tahura, termasuk zonasi, ekowisata berkelanjutan, serta strategi adaptasi berbasis ekosistem.